



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAL PRAKTIK TUKANG GIGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Strata 1 (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri



DISUSUN OLEH:

AGUSTINA SUSILAWATI

301221010018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

2026

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

Jl. HR. Soebrantas No. 10 Tembilahan-INHIL-Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AGUSTINA SUSILAWATI
NIM : 301221010018
Semester/ Kelas : VIII
Fakultas : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mall
Praktek Tukang Gigi Menurut Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Tembilahan, 9 Juli 2026

PEMBIMBING I

VIVI ARFIANI SIREGAR, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

KMS. NOVYAR SATRIAWAN, F, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam
Indragiri,

BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, S.H., M.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyinpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AGUSTINA SUSILAWATI
NIM : 301221010018
Semester/ Kelas : VIII
Fakultas : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Mall Praktek Tukang Gigi Menurut Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan, 9 Juli 2026
Yang Menyatakan,

AGUSTINA SUSILAWATI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

 UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
FAKULTAS HUKUM
Kampus Seberantas Jalan H.R. Seberantas Nomor : 10, Tembilahan Indragiri Hilir Provinsi Riau Indonesia
0853 6330 1314 (0768) 25386 Laman website: <http://www.unisi.ac.id>

BERITA ACARA MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor: /SK/UNISI/E/VII/2026 Tentang Penetapan Jadwal dan Tim Penguji Ujian *Oral Comprehensive* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Semester Genap T.A 2025-2026, maka pada hari ini, Senin, 27 Juli 2026 telah dilaksanakan Ujian *Oral Comprehensive* Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Program Studi Ilmu Hukum :

Nama : Agustina Susilawati
NIM : 301221010018
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mal Praktik Tukang Gigi Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Waktu : 11:00 - 12 : 00 Wib
Tempat : Ruang Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Hasil : Lulus dengan Nilai A
Keterangan : Aman dan Tertib

Tim Penguji

1. Vivi Arfiani Siregar., S.H.M.H.
2. Kms, Novyar Satryawan Fikri., S.H.M
3. Dr. Siti Rahma., S.H.M.H
4. Syarifuddin., S.H.M.H
5. Dr. Bambang Sasmita Adi Putra., S.E.S.H.M.H

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum UNISI

Kepala Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNISI


Dr. AETAH HAR, S. Sos., M.H
NIPY. 1667 03 321


Dr. BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, SH., MH
NIPY. 2391 03 251

Umu Kanya Abdi



KATA PENGATAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat pada penulis selaku hamba dan umat-Nya dan kemudahan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dalam perkuliahan dan mampu menyelesaikan studi ke sarjana hukum sesuai ketepatan waktunya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan atas penelitian yang dengan judul “Tinjauan Yiridis Mall Praktik Tukang Gigi Menurut Undang-Undang 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan)”, dan berkat dukungan:

1. Dr. H. Najarmuddin, Lc. MA., selaku Rektor Universitas Islam Indragiri;
2. Dr. Ali Azhar, Sos., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri;
3. Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri;
4. Vivi Arfiani Siregar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan secara terstruktur selama proses pembimbingan berlangsung;
5. KMS. Novyar Satriawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan pada penulisan dalam penyusunan skripsi;
6. Para dosen yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

belajar dan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri;

7. Para Tata Usaha Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISI yang telah memberikan pelayanan akademik kepada penulis dan memberikan kemudahan pada pengurusan administrasi perkuliahan;
8. Para staf Perpustakaan Universitas Islam Indragiri yang telah membantu penulis dalam memperoleh literatur penelitian ini;
9. Seluruh keluarga besar penulis, dan orang yang penulis cintai terkhususnya orang tua penulis yang selalu memberikan semangat, mendampingi, dan mengingatkan penulis akan pentingnya pendidikan kesarjanaan bagi penulis.
10. Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sangat berpartisipasi dalam kesuksesan dan kelancaran selama penulis menyelesaikan Pendidikan.

Demikianlah ucapan terima kasih penulis sampaikan, dalam hal ini penulis menyadari penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna untuk itu kritik dan saran penulis harapkan.

Tembilahan, 2026
Penulis

Agustina Susilawati



Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mall Praktik Tukang Gigi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pembimbing I : Vivi Arfiani Siregar, S.H.MH Pembimbing II : Kms, Novyar Satryawan Fikri, S.H.MH

Oleh
Agustina Susuulawati
Abstrak

Praktik pelayanan kesehatan tanpa izin, termasuk praktik tukang gigi yang melampaui kewenangannya atau mengaku sebagai tenaga medis, merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan Pasal 439, setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tetapi melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00. Pengaturan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat agar memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi serta kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana praktik tukang gigi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi masih maraknya praktik pelayanan tukang gigi tanpa izin yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Permasalahan tersebut penting dikaji mengingat praktik tukang gigi tanpa izin masih banyak ditemukan di masyarakat dan tidak jarang menimbulkan kerugian berupa luka, infeksi, cacat permanen, bahkan kematian akibat tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, pendapat para ahli, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan praktik pelayanan kesehatan dan pertanggungjawaban pidana. Analisis penelitian didasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana, teori kepastian hukum,

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan apabila tindakan pelaku menimbulkan akibat berupa luka, cacat, atau kematian pada pasien. Pembuktian terhadap adanya kesalahan dilakukan melalui proses penyidikan dan persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana. Selain ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana karena kelalaian yang mengakibatkan luka atau kematian. Namun demikian, penerapan ketentuan tersebut tetap memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga ketentuan khusus dalam Undang-Undang Kesehatan didahulukan apabila mengatur perbuatan tersebut secara khusus.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum di bidang kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pasien maupun tenaga kesehatan. Kepastian hukum mencakup pengaturan mengenai izin praktik, tindakan medis, tanggung jawab tenaga kesehatan, rekam medis, serta penyelesaian kasus malpraktik. Di sisi lain, berkembangnya praktik tukang gigi tanpa izin dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tingginya kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan dengan biaya murah, keterbatasan akses terhadap pelayanan dokter gigi, lemahnya pengawasan dari instansi terkait, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat agar praktik pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi menjamin keselamatan dan perlindungan hukum bagi setiap pasien



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Abstract

The practice of providing healthcare services without a license including instances where dental technicians (tukang gigi) exceed their authorized scope of practice or misrepresent themselves as medical professionals constitutes an act subject to criminal sanctions under Law Number 17 of 2023 concerning Health. Article 439 stipulates that any person who is not a medical professional or healthcare worker but practices as if they were one implying possession of a valid Practice License (SIP) may be punished by imprisonment for a maximum of five years or a fine of up to IDR 500,000,000.00. This regulation serves as a form of legal protection for the public, ensuring access to safe, high-quality healthcare services provided by personnel who possess the requisite competence and legal authorization in accordance with statutory regulations.

This study aims to provide a juridical analysis regarding perpetrators of unauthorized dental technician practices under Law Number 17 of 2023 concerning Health, and to identify the factors contributing to the prevalence of such unlicensed practices, which carry the risk of criminal liability. Examining this issue is crucial, given that unauthorized dental technician practices remain widespread in the community and frequently result in harm such as injuries, infections, permanent disability, or even death stemming from procedures that fail to meet professional standards or applicable legal requirements.

The research employs a normative legal method (juridical-normative) with a descriptive-analytical approach. It examines various statutory provisions, legal principles, legal theories, expert opinions, and scholarly literature related to healthcare practices and criminal liability. The analysis is grounded in theories of criminal liability and legal certainty.

From a criminal law perspective, criminal liability may be imposed if the perpetrator's actions result in injury, disability, or death to the patient. Establishing culpability involves investigation and trial proceedings based on admissible evidence, in accordance with the provisions of criminal procedural law. In addition to the criminal provisions set forth in Law Number 17 of 2023 concerning Health, perpetrators may also be held liable under the provisions of the Criminal Code regarding criminal acts of negligence resulting in injury or death. However, the application of these provisions remains subject to the principle of **lex specialis derogat legi generali**; thus, the specific provisions within the Health Law take precedence if they specifically regulate the act in question.

This research demonstrates that legal certainty in the health sector plays a crucial role in protecting the rights and obligations of both patients and healthcare professionals. Such legal certainty encompasses regulations regarding practice licenses, medical procedures, the liability of healthcare professionals, medical records, and the resolution of malpractice cases. Conversely, the proliferation of unlicensed dental practitioners is driven by several factors, including low public legal awareness, a high demand for low-cost healthcare services, limited access to professional dental care, weak supervision by relevant authorities, and suboptimal law enforcement against offenders. Therefore, synergy among the government, law enforcement agencies, and the public is essential to enhance supervision, law enforcement, and public education, ensuring that healthcare services are delivered in compliance with statutory regulations to guarantee the safety and legal protection of every patient.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
TANDA PERSETUJUAN.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teori.....	14
F. Kerangka Konseptual.....	23
G. Metode Penelitian	24

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	27
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	32
C. Tinjauan Umum Mall Praktik.....	34

BAB III PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Mall Praktik Tukang Gigi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.....	47
B. Faktor- Faktor Pelayanan Tukang Gigi Tanpa Izin.....	83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99

Daftar Pustaka



DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
SIP	: Surat Izin Praktik
STR	: Surat Tanda Registrasi
UKDGI	: Ujian Kompetensi Dokter Gigi Indonesia
PDGI	: Persatuan Dokter Gigi Indonesia
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
Menkes	: Menteri Kesehatan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
DPJP	: Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas
PUU	: Pengujian Undang-Undang
MK	: Mahkamah Konstitusi
drg.	: Dokter Gigi
RI	: Republik Indonesia
Rp	: Rupiah